



Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi Tahun 2018-2025

Nur Afriza Nauli^{1*}, Etik Umiyati², Helen Parkhurst³

Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: nurafrizanauli69@gmail.com

Abstract. *This study examines the effects of the poverty rate, government expenditure, and employment opportunities on the Human Development Index (HDI) of regencies and municipalities in Jambi Province during the 2018–2025 period. The study used secondary panel data comprising time-series data from 2018 to 2025 and cross-sectional data from eleven regencies and municipalities. Panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM) was employed based on the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests. The results show that the poverty rate has a negative and significant effect on HDI ($\beta = -1.260869$, $p = 0.0029$), indicating that an increase in poverty reduces human development. Government expenditure has a positive and significant effect on HDI ($\beta = 4.57 \times 10^{-12}$, $p = 0.0009$), while employment opportunities also positively and significantly influence HDI ($\beta = 7.65 \times 10^{-5}$, $p < 0.001$). Simultaneously, all independent variables significantly affect HDI ($F = 42.82617$, $p < 0.001$). The coefficient of determination ($R^2 = 0.882678$) indicates that 88.27% of the variation in HDI is explained by the model. These findings suggest that reducing poverty, increasing public expenditure, and expanding employment opportunities are essential strategies for improving human development in Jambi Province.*

Keywords: *Employment Opportunities; Government Expenditure; Human Development Index; Panel Data; Poverty Rate.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan kesempatan kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2018–2025. Penelitian menggunakan data panel sekunder yang terdiri atas data deret waktu tahun 2018–2025 dan data penampang dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) yang dipilih berdasarkan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM ($\beta = -1,260869$; $p = 0,0029$), sehingga peningkatan kemiskinan menurunkan pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM ($\beta = 4,57 \times 10^{-12}$; $p = 0,0009$), demikian pula kesempatan kerja yang berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 7,65 \times 10^{-5}$; $p < 0,001$). Secara simultan, ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap IPM ($F = 42,82617$; $p < 0,001$). Nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,882678$) menunjukkan bahwa 88,27% variasi IPM dapat dijelaskan oleh model. Temuan ini menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan perluasan kesempatan kerja merupakan strategi penting untuk meningkatkan pembangunan manusia di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia; Kesempatan Kerja; Kemiskinan; Pengeluaran Pemerintah; Regresi Data Panel.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan manusia pada era modern dipandang sebagai aspek fundamental dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif pembangunan modern, manusia ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan yang harus memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP, 2022) pembangunan manusia diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan tiga dimensi dasar

kehidupan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak (Lisdayani et al., 2022).

Konsep pembangunan manusia sejalan dengan pendekatan *capability approach* yang dikemukakan oleh Amartya Sen dan dikembangkan lebih lanjut oleh Martha Nussbaum. Pendekatan ini menegaskan bahwa pembangunan yang sesungguhnya adalah proses memperluas kemampuan (*capabilities*) dan kebebasan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap bernilai. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya dipahami sebagai peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga sebagai upaya memperluas pilihan hidup masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang memadai (Wee & Derung, 2024; Sidabutar & Thamrin, 2025).

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Akan tetapi, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat. Masih terdapat berbagai kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menciptakan pembangunan manusia yang inklusif. Penelitian Wasito, (2023) menyebutkan bahwa pendekatan kapabilitas relevan digunakan untuk memahami ketimpangan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Sementara itu, penelitian Sari et al., (2023) menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui IPM tidak hanya menjadi hasil pembangunan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Didi et al., 2026).

Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan pembangunan nasional Indonesia yang tertuang dalam dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia memerlukan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan penciptaan lapangan kerja produktif (Aini & Rismanty, 2026).

Secara nasional, capaian Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,90 dan berada pada kategori pembangunan manusia menengah atas. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi-provinsi dengan tingkat pembangunan yang tinggi seperti DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Timur memiliki kualitas pendidikan, layanan

kesehatan, dan peluang ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lain. Sebaliknya, beberapa provinsi di kawasan timur Indonesia seperti Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat masih menunjukkan capaian IPM yang relatif rendah. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat (Aini & Rismanty, 2026).

Dalam konteks regional Pulau Sumatera, capaian IPM Jambi pada tahun 2025 sebesar 75,13 masih berada di bawah rata-rata nasional. Jika dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Sumatera seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau, posisi Provinsi Jambi masih relatif tertinggal. Meskipun demikian, capaian tersebut masih lebih baik dibandingkan beberapa provinsi lain seperti Lampung dan Sumatera Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Jambi berada pada kategori menengah, namun daya saing pembangunan manusianya masih perlu ditingkatkan. Rendahnya capaian IPM di beberapa kabupaten/kota mengindikasikan bahwa masih terdapat keterbatasan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan manusia adalah tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan mencerminkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga berdampak pada rendahnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Menurut *World Bank*, kemiskinan menjadi hambatan utama dalam pembangunan manusia karena membatasi kemampuan individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Penelitian Putri, (2023) dan Rizky & Handayani (2022) menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif terhadap IPM. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka semakin rendah kemampuan masyarakat dalam memperoleh layanan dasar yang berkualitas.

Selain kemiskinan, pengeluaran pemerintah juga menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan manusia. Berdasarkan teori human capital yang dikemukakan oleh Gary Becker, investasi pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah yang efektif akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian Rahmadani (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap IPM, meskipun efektivitas pengelolaan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.

Faktor lain yang turut memengaruhi pembangunan manusia adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja yang luas akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya beli, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Sebaliknya, tingginya tingkat pengangguran akan berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat. Menurut Todaro & Smith (2020), peningkatan kesempatan kerja produktif merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan manusia. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Prasetyo (2022) yang menyatakan bahwa peningkatan tenaga kerja produktif berpengaruh positif terhadap peningkatan IPM.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai layanan dasar lainnya. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Menurut Todaro & Smith (2020), kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai kondisi rendahnya pendapatan, tetapi juga rendahnya kualitas kesehatan, pendidikan, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendapat serupa dikemukakan oleh Kuncoro (2013) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi standar hidup minimum yang berlaku dalam masyarakat. Standar hidup minimum tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam perspektif pembangunan manusia, *United Nations Development Programme* menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan tidak memiliki akses terhadap peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, seperti hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang layak. Secara umum, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang berada di bawah batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Dalam konteks internasional, World Bank (2022) menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar USD 1,90 per hari. Sementara itu, kemiskinan relatif berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat,

dimana seseorang dianggap miskin apabila tingkat kesejahteraannya jauh berada di bawah rata-rata masyarakat di sekitarnya.

Selain itu, kemiskinan juga dipandang sebagai fenomena multidimensional yang mencakup rendahnya tingkat pendidikan, buruknya kondisi kesehatan, keterbatasan akses terhadap layanan publik, serta rendahnya kualitas lingkungan tempat tinggal. Dalam perspektif *capability approach* yang dikemukakan oleh Amartya Sen, kemiskinan dipahami sebagai bentuk keterbatasan kapabilitas (*capability deprivation*), yaitu tidak mampuan individu dalam menjalani kehidupan yang dianggap bernilai. Berdasarkan faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan temporer. Kemiskinan alamiah terjadi akibat keterbatasan sumber daya alam dan kondisi geografis yang tidak mendukung. Kemiskinan struktural disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sarana ekonomi dan kesempatan kerja. Kemiskinan kultural berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, sedangkan kemiskinan temporer terjadi akibat faktor eksternal seperti bencana alam atau krisis ekonomi.

Di Indonesia, pengukuran kemiskinan umumnya menggunakan pendekatan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non pangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk miskin dan memantau perkembangan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu. Kemiskinan memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan manusia. Tingginya tingkat kemiskinan akan membatasi kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menurunkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mankiw (2020), pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Dalam teori ekonomi Keynesian, pengeluaran pemerintah dipandang sebagai instrumen yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan konsumsi dan investasi masyarakat, sehingga mendorong peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Hukum Wagner menjelaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya aktivitas sektor publik dan pengeluaran pemerintah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin besar pula kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut (Sukirno, 2016), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pengeluaran pemerintah, antara lain proyeksi penerimaan pajak, tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah, serta pertimbangan politik dan keamanan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi pengangguran, mengendalikan inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Murni (2016) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki empat fungsi utama dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi dinamisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang publik dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya ekonomi. Fungsi distribusi berkaitan dengan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi stabilisasi bertujuan menjaga kestabilan ekonomi, sedangkan fungsi dinamisasi berfungsi mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia (*human capital investment*). Menurut teori Human Capital yang dikemukakan oleh Gary Becker, investasi pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, maka kualitas hidup masyarakat juga akan meningkat, sehingga berdampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain itu, pengeluaran pemerintah juga berperan dalam mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Menurut (Jhingan, 2012), kegagalan pasar dapat terjadi akibat adanya barang publik, eksternalitas, monopoli, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal dan pengeluaran publik agar tercipta efisiensi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Secara empiris, pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif terhadap pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah yang efektif pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan

meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Borjas, (2020), kesempatan kerja adalah ketersediaan pekerjaan dalam pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, permintaan tenaga kerja, serta struktur sektor-sektor produktif dalam perekonomian.

(Todaro & Smith, 2020) menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja menunjukkan kemampuan suatu sektor ekonomi dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tingginya penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya kesempatan kerja akan menyebabkan pengangguran yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat. Dalam teori permintaan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah dan kebutuhan perusahaan terhadap faktor produksi. Menurut (Simanjuntak, 2011), semakin tinggi tingkat upah, maka permintaan tenaga kerja cenderung menurun.

Kesempatan kerja memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan manusia. Masyarakat yang memiliki pekerjaan cenderung memiliki pendapatan yang lebih baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Dengan demikian, peningkatan kesempatan kerja akan berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian empiris menunjukkan bahwa kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap IPM. Kesempatan kerja yang luas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kualitas hidup. Selain itu, masyarakat yang bekerja juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia suatu negara atau daerah. Menurut *United Nations Development Programme*, IPM adalah ukuran rata-rata capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Konsep pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di Indonesia, penghitungan IPM dilakukan oleh Badan Pusat Statistik menggunakan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup, pendidikan yang diukur melalui harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita. Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 100, dimana semakin tinggi nilai IPM menunjukkan semakin baik kualitas pembangunan manusia.

IPM memiliki peranan penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah. Daerah dengan capaian IPM yang tinggi umumnya memiliki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Sebaliknya, rendahnya IPM menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup masyarakat dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Peningkatan IPM berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tingginya tingkat pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Hubungan Antar Variabel

Tingkat kemiskinan memiliki hubungan negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka semakin rendah kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Menurut Amartya Sen, kemiskinan merupakan bentuk keterbatasan kapabilitas individu dalam menjalani kehidupan yang bernilai. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin efektif pengeluaran pemerintah, maka semakin besar kontribusinya dalam meningkatkan IPM. Kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap IPM karena masyarakat yang memiliki pekerjaan akan memperoleh pendapatan yang lebih baik dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta standar hidup yang layak. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder diperoleh dari media publik. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang disajikan dalam bentuk data panel yang mana time series nya adalah mulai tahun 2018-2025,

dan *cross section* nya adalah kabupaten atau kota di provinsi jambi, adapun data yang dikumpulkan yaitu data kemiskinan, data pengeluaran pemerintah, data tenaga kerja dan data indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang diperoleh dari berbagai instansi antara lain, survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Provinsi Jambi.

Analisis Data

Pengujian dilakukan menggunakan Uji Chow atau *Likelihood Ratio Test*. Terdapat tiga pendekatan utama yang umum digunakan, yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk menentukan model mana yang paling sesuai dengan karakteristik data, dilakukan beberapa tahapan pengujian, antara lain uji Chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM) (Ghozali & Ratmono, 2017). Mengenai perkembangan tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dilakukan secara deskriptif dengan memanfaatkan ukuran-ukuran perkembangan dan rasio yang relevan (Ghozali, 2016).

$$G = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (I)$$

Dimana :

- G = Laju pertumbuhan variabel X
- X_t = Realisasi penerimaan x tahun tertentu
- X_{t-1} = Realisasi penerimaan x tahun sebelumnya
- X = Variabel dependent atau independent

Alat regresi berganda terkait pengaruh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2018-2025. Data diolah merupakan data panel dengan bantuan software Eviews seri 12.0. Model persamaan regresi dalam penelitian ini menggunakan semi logaritma berdasarkan atas perbedaan satuan ukur dari setiap variabel regresi, sehingga dengan spesifikasi model dasar sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (II)$$

Keterangan:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia (Tahun)
- X_1 = Tingkat Kemiskinan (Persen)
- X_2 = Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)
- X_3 = Kesempatan Kerja (Jiwa)
- β_0 = Konstanta
- β_{1-3} = koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas
- it = Kabupaten/Kota i tahun t
- μ = standar error

Berdasarkan variasi-variasi asumsi yang dibentuk, maka terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel yaitu:

- a. Metode Common-Constant (*The Pooled OLS Method*=PLS)
- b. Metode *Fixed Effect* (FEM)
- c. Metode *Random Effect* (REM)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum, baik makanan maupun non-makanan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketimpangan sosial. Secara keseluruhan, perkembangan pengeluaran pemerintah di Provinsi Jambi selama periode 2018–2025 menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah serta komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran agar pengeluaran pemerintah dapat memberikan dampak optimal terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

Kesempatan kerja merupakan kondisi yang menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia kerja dalam suatu wilayah. Indikator ini sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena berkaitan langsung dengan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM tidak hanya menilai aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Pengujian Model *Pooled Least Square*, *Fixed Effect* Dan *Random Effect*

Berdasarkan data panel tersebut, maka model regresi data panel yang terdiri atas tiga pendekatan, yaitu model *Pooled Least Squares*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*.

Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel mana yang sebaiknya digunakan, apakah *Pooled Least Squares* atau *Fixed Effect Model*. Pengujian ini dilakukan

menggunakan program Eviews. Hipotesis dalam menentukan model regresi data panel adalah apabila nilai *cross section chi-square* < nilai signifikan (0,05), maka *Fixed Effect model* akan dipilih.

Tabel 1. Hasil Estimasi Uji Chow.

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: POOL01			
Test cross-section Fixed Effects			
Effects Test	Statistis	d.f.	Prob.
Cross-section F	38,493973	(10,74)	0,0000
Cross-section Chi-square	160,587135	10	0,0000

Keterangan:*) Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Berdasarkan Tabel 1 estimasi FEM yang signifikan secara statistik dan peningkatan nilai R-squared yang sangat besar, maka model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan *Pooled Least Squares*. Dengan demikian, model PLS ditolak dan analisis dilanjutkan dengan membandingkan FEM dan REM dengan melakukan Uji Hausman.

Uji Hausman

Untuk keperluan memilih model yang terbaik di antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect* yang akan dijadikan model penelitian.

Tabel 2. Hasil Estimasi Uji Hausman.

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: POOL01			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10,280531	3	0,0163

Keterangan:*) Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Berdasarkan Tabel 2 pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) sebesar $k-1 = 3-1 = 2$, maka besarnya batas kritisnya adalah 5,991.

Uji Lagrange Multiplier

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Pooled Least Square* (PLS) dengan *RandomEffect* dalam model.

Uji Asumsi Klasik Data Panel

Melakukan estimasi regresi data panel dengan terpilihnya model *Fixed Effect*, agar lolos terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model Syarat-

syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas.

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik.

Root MSE	1,227414	R-squared	0,882678
Mean dependent var	72,47852	Adjusted R-squared	0,862067
S.D. dependent var	3,603978	S.E. of regression	1,338494
Akaike info criterion	3,565878	Sum squared resid	132,5759
Schwarz criterion	3,959999	Log likelihood	-142,8986
Hannan-Quinn criter.	3,724659	F-statistic	42,82617
Durbin-Watson stat	0,836799	Prob(F-statistic)	0,000000

Keterangan:*) Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12

Berdasarkan Tabel 3 pada pengujian *Durbin-Watson* diketahui bahwa persamaan tersebut bebas dari autokorelasi. Dimana nilai DW hitung (0,8367992) terletak diantara $0 < DW < dl$ (1,5836) yaitu di wilayah bebas autokorelasi positif. Pada hasil uji DW dapat dikatakan bahwa persamaan regresi diatas lolos uji asumsi klasik autokorelasi.

Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja) terhadap variabel dependen (indeks pembangunan manusia) secara individual.

Tabel 4. Uji Parsial (Uji-t).

Variabel	t-Statistic	t-tabel	Prob.	Alpha	Keterangan
X1? (Tingkat Kemiskinan)	-3,078903	1,9883	0,0029	0,05	Signifikan (t-Statistic > t-tabel atau Prob. < Alpha)
X2? (Pengeluaran Pemerintah)	3,455109	1,9883	0,0009	0,05	Signifikan (t-Statistic < t-tabel atau Prob. > Alpha)
X3? (Kesempatan Kerja)	4,571544	1,9883	0,0000	0,05	Signifikan (t-Statistic > t-tabel atau Prob. < Alpha)

Keterangan : t-tabel $(n-k) = (88-3) = 85$; alfa 5 persen $\Rightarrow 1,9883$ Y Indeks Pembangunan Manusia

Sumber : Data Eview, Olahan

Berdasarkan Tabel 4 variabel tingkat kemiskinan (X1) memiliki nilai t-Statistik sebesar -3,078903 > t-tabel 1,9883 atau probabilitas 0,0029 < alfa 0,05, sehingga dinyatakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2025.

Uji Simultan (Uji-F)

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui variabel independen, yaitu tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja, secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Tabel 5. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).

Variabel	F-Statistic	F-tabel df1 = 2; df2 = 84; $\alpha = 5\%$	Prob.	Alpha	Keterangan
X1?, X2?, X3?	42,82617	3,105157	0,0000	0,05	Signifikan (F-hitung > F-tabel atau Prob. < Alpha)

Keterangan : X1 Tingkat Kemiskinan X2 Pengeluaran Pemerintah X3 Kesempatan Kerja Y Indeks Pembangunan Manusia
Sumber : Data Eview, Olahan

Berdasarkan Tabel 5 uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan di Jambi, karena nilai F-hitung (42,82617) > F-tabel (3,105157) dan Prob. (0,0000) < (0,05).

Tabel 6. Hasil Perbandingan Uji Chow, Uji Hausman Dan Uji Lagrange Multiplier.

Pengujian	Nilai Probabilitas	Kriteria	Keputusan
Uji Chow	0	< 0,05	Fixed Effect Model
Uji Hausman	0,0163	< 0,05	Fixed Effect Model
Uji Lagrange Multiplier	0	< 0,05	Random Effect lebih baik dari PLS

Sumber : Hasil Olahan, 2026

Berdasarkan Tabel 6 uji statistik *Chow* dan uji *Hausman* menunjukkan bahwa model yang tepat untuk memodelkan data panel pada pendekatan *Fixed Effect* model (FEM). Dengan demikian, karena mampu memberikan estimasi yang konsisten serta efisien dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Intersep individu kab/kota i = intersep ke i (β_{0i}) + intersep keseluruhan (β_0)

Tabel 7. Hasil perhitungan intersep kabupaten/kota dapat diperoleh sebagai berikut.

BATANGHARI—C	3,839422	+ 63,58383	= 67,423252
BUNGO—C	-3,676158	+ 63,58383	= 59,907672
KERINCI—C	2,716976	+ 63,58383	= 66,300806
KTJAMBI—C	-2,554851	+ 63,58383	= 61,028979
KTSGPENUH—C	9,742626	+ 63,58383	= 73,326456
MERANGIN—C	-2,743484	+ 63,58383	= 60,840346
MRJAMBI—C	-9,667397	+ 63,58383	= 53,916433
SAROLANGUN—C	2,910394	+ 63,58383	= 66,494224
TANJABBAR—C	-1,041964	+ 63,58383	= 62,541866

TANJABTIM—C	3,975962	+ 63,58383	= 67,559792
TEBO—C	-3,501525	+ 63,58383	= 60,082305

Sumber : Olahan Eviews 12

Berdasarkan Tabel 7 estimasi *Fixed Effect Model* (FEM) pada data panel, penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam membentuk IPM yang tercermin dari nilai intersep masing-masing daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2018–2025. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan nilai R^2 sebesar 0,882678, yang berarti 88,27% variasi IPM dapat dijelaskan oleh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan pembangunan berbasis wilayah melalui pengurangan kemiskinan, optimalisasi pengeluaran pemerintah, dan perluasan kesempatan kerja guna meningkatkan pemerataan pembangunan manusia di Provinsi Jambi.

Interperetasi Model Fixed Effect

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM) pada Tabel 5.6, diperoleh persamaan regresi yang menunjukkan pengaruh tingkat kemiskinan (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2) dan kesempatan kerja (X_3) terhadap indeks pembangunan manusia (Y) kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dengan menggunakan alat analisis Eviews seri 12.0 dijelaskan oleh persamaan berikut :

$$Y_{it} = 63,58383 - 1,260869X_{1it} + 4,57 \times 10^{-12} X_{2it} + 7,65 \times 10^{-5} X_{3it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (III)$$

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil estimasi, tingkat kemiskinan memiliki koefisien sebesar -1,260869 dengan nilai probabilitas $0,0029 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Artinya, setiap kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 1 persen akan menurunkan IPM sebesar 1,26 poin dengan asumsi variabel lain tetap.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki koefisien sebesar $4,57 \times 10^{-12}$ dengan probabilitas $0,0009 < 0,05$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Walaupun nilai koefisien terlihat

sangat kecil secara numerik, kondisi ini wajar karena variabel pengeluaran pemerintah diukur dalam nominal rupiah yang sangat besar. Secara substantif, peningkatan anggaran pemerintah tetap memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Pengaruh Kesempatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesempatan kerja memiliki koefisien sebesar $7,65 \times 10^{-5}$ dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Artinya, semakin tinggi kesempatan kerja, maka semakin tinggi pula IPM. Kesempatan kerja yang luas memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan yang lebih stabil sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarga, memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik, serta meningkatkan standar hidup.

Pengaruh Simultan Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Kesempatan Kerja terhadap IPM

Berdasarkan hasil uji simultan, diperoleh nilai F-statistic sebesar 42,82617 dengan probabilitas $0,0000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan kesempatan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, fiskal, dan ketenagakerjaan. IPM tidak dapat ditingkatkan hanya dengan fokus pada satu kebijakan, tetapi memerlukan pendekatan yang terintegrasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2018–2025 menunjukkan perkembangan yang relatif positif. Hal ini terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh wilayah kabupaten/kota. Meskipun demikian, masih terdapat ketimpangan pembangunan antar daerah, terutama antara wilayah perkotaan dan beberapa kabupaten yang tingkat IPM-nya masih relatif rendah.

Hasil regresi data panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar -1,260869 dan nilai probabilitas 0,0029. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar $4,57 \times 10^{-12}$ dan probabilitas 0,0009. Kesempatan kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar $7,65 \times 10^{-5}$ dan probabilitas 0,0000. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh

signifikan terhadap IPM dengan nilai F-statistic sebesar 42,82617 dan probabilitas 0,0000. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,882678 menunjukkan bahwa 88,27% variasi IPM kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, dan kesempatan kerja, sedangkan 11,73% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Aiima, H. (2016). *Ekonomi pembangunan dan kemiskinan*. Penerbit Erlangga.
- Alfredoi, A. (2021). *Teori ekonomi pembangunan: Konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Anand, R., Mishra, S., & Peiris, S. J. (2013). *Inclusive growth: Measurement and determinants*. IMF Working Paper No. 13/135. <https://doi.org/10.5089/9781484323212.001>
- Ann, D., Lantion, S., Musngi, G. V., & Cabauatan, R. R. (2023). Assessing the relationship of Human Development Index (HDI) and government expenditure on health and education in selected ASEAN countries. *International Journal of Social and Management Studies (IJOSMAS)*, 4(6), 13–26. <http://www.ijosmas.org>
- Borjas, G. J. (2020). *Labor economics* (8th ed.). McGraw-Hill Education.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan EViews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irawan, B. (2022). *Ekonomi ketenagakerjaan dan pembangunan*. Deepublish.
- Ismail, I. F., Walewangko, E. N., & J. I. S. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Manado. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 21(3), 103–114.
- Izzah, N. (2015). *Ekonomi regional dan pembangunan daerah*. Rajagrafindo Persada.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (Ed. ke-1). Rajawali Pers.
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan* (5th ed.). UGM Press.
- Mankiw, N. G. (2020). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publishers.
- Murni, A. (2016). *Ekonomi makro* (Ed. revisi). Refika Aditama.
- Putri, A. G. (2023). Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 44–58.
- Putri, A. M. (2023). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional dan Pembangunan*, 14(2), 87–98.
- Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The government expenditure efficiency towards the human development. *Procedia Economics and Finance*, 5, 615–622. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00072-5)
- Prasetyo, D. (2022). Analisis pengaruh kesempatan kerja terhadap pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 201–213.

- Rahmadani, F. (2023). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan*, 11(1), 35–49.
- Rizky, R. A., & Handayani, T. (2022). Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia: Bukti empiris dari provinsi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 13(2), 56–70.
- Simanjuntak, P. J. (2011). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. LPFEUI.
- Sari, M. D., Murwiati, D., & Sitorus, P. (2023). Human capital development and regional economic growth in Indonesia: An endogenous growth perspective. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 112–129.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori pengantar*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020a). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education Limited.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020b). *Pembangunan ekonomi* (Ed. ke-1). Erlangga.
- Umiyati. (2014). *Pembangunan ekonomi daerah: Pendekatan dan aplikasi*. Graha Ilmu.
- United Nations Development Programme. (2022a). *Human development report 2022: Uncertain times, unsettled lives*. UNDP. <https://hdr.undp.org/>
- Wasito, R. (2023). Analisis ketimpangan pembangunan manusia di Indonesia dalam perspektif capability approach. *Jurnal Pembangunan dan Transformasi Sosial Ekonomi*, 5(2), 144–160.
- Aini, L. Q., & Rismanty, V. A. (2026). Pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. *Pajak dan Manajemen Keuangan*, 3(1). <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i1.2155>
- Didi, D., et al. (2026). Pemodelan strategi keberhasilan koperasi dengan jumlah anggota sebagai pemediasi dengan pendekatan analisis uji Sobel pada regresi data panel menggunakan EViews. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 6(1). <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v6i1.8356>
- Sidabutar, E. P. R., & Thamrin, M. H. (2025). Strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesempatan kerja melalui hubungan antar kerja lokal (AKL) di Kota Pematang Siantar. *Jurnal Media Administrasi*, 10(2). <https://doi.org/10.56444/jma.v10i2.3234>
- Wee, S., & Derung, T. N. (2024). Mengembangkan jaringan usaha kecil untuk menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda dan individu kurang terampil: Implikasi dari ajaran *Pacem in Terris*. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 5(1). <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v5i1.3416>
- Lisdayani, et al. (2022). Ketimpangan sosial dalam penegakan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)*, 1(1). <https://doi.org/10.58192/ebismen.v1i1.86>